



RENCANA KINERJA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TAHUN 2024



**BADAN STANDARDISASI KEBIJAKAN DAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBSPJKKP)**
Jl. Sokonandi 9 Yogyakarta, Telp (0274) 512929, 563939, Fax. (0274) 563655

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi target kinerja yang diharapkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dan disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki tujuan untuk membangun manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 disusun pada awal tahun sebelum tahun anggaran berjalan untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Kami berharap agar Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) pada tahun anggaran 2024 dan dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan.

Yogyakarta, 23 Januari 2023

Kepala



Agus Kuntoro

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	6
A. Hasil-Hasil Pembangunan.....	6
B. Arah Pembangunan.....	9
BAB III RENCANA KINERJA.....	12
A. Sasaran.....	12
B. Indikator Kinerja.....	21
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN	
Formulir Rencana Kinerja 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2015.....	7
Tabel 2.2 Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2016.....	8
Tabel 2.3 Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2017.....	8
Tabel 2.4 Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2018.....	8
Tabel 2.5 Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2019.....	9
Tabel 2.6 Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2020	9
Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung	14
Tabel 3.2 Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran	16
Tabel 3.3 Rencana Kegiatan dan Anggaran BBSPJIKKP TA 2023.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Penyusunan rencana kinerja ini merupakan proses perencanaan kinerja dan indikator kinerja berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024 dibuat dalam rangka penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan perubahan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan BBSPJIKKP pada tahun 2024. Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024 mengacu pada Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 yang berpedoman pada Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) merupakan Balai Besar Industri sektoral yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa

Industri (BSKJI). Kegiatan BBSPJIKKP sesuai dengan turunan program dari BSKJI adalah kegiatan standardisasi dan pelayanan jasa industri. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat diukur keberhasilannya, maka perlu dibuat rencana kinerja. Penyusunan rencana kinerja BBSPJIKKP ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Agar rencana kinerja BBSPJIKKP tahun 2023 sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunannya, sasaran-sasaran kegiatan yang diukur sebagai komponen ketercapaian kinerja harus sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BBSPJIKKP Tahun 2021 - 2024.

Adapun tujuan dari BBSPJIKKP adalah identik dan selaras dengan yang menjadi tujuan dari BSKJI, penyesuaian indikator tujuan dan targetnya dilakukan karena pada dasarnya tujuan dari BSKJI tersebut capaiannya merupakan akumulasi dari capaian dari indikator yang dicascading ke pusat dan UPT yang terkait. Tujuan BBSPJIKKP seperti yang tercantum dalam Renstra 2021 - 2024 antara lain:

T1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai penguatan implementasi making Indonesia 4.0 dan peningkatan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.

T2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas dan terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan.

T3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas.

T4. Meningkatkan good governance dalam rangka mencapai pengawasan internal yang efektif dan efisien, terwujudnya ASN BBSPJIKKP yang professional, penguatan layan publik, dan penguatan akuntabilitas organisasi.

Dengan dilakukannya upaya untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan visi BBSPJIKKP untuk menjadi balai besar yang akuntabel, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dapat tercapai.

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja TA 2024 adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BBSPJIKKP
2. Sebagai kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan BBSPJIKKP pada tahun 2024
3. Memudahkan dalam menilai keberhasilan/kegagalan atas target kinerja yang telah ditetapkan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

- Dasar Hukum Tupoksi
 1. Permenperin No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
 2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI
- Tugas Pokok

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI). BBSPJIKKP mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;

- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, struktur organisasi BBSPJIKKP terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BBSPJIKKP ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBSPJIKKP

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Adapun kelompok jabatan fungsional di BBSPJIKKP antara lain Penguji Mutu Barang (PMB), Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), Pembina Industri (PI), Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Anggaran, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Analis Kepegawaian, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Arsiparis yang mendukung tugas dan fungsi BBSPJIKKP.

E. Ruang Lingkup

Batasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja ini disusun untuk Tahun Anggaran 2024
2. Unit-unit yang termasuk dalam Renkin BBSPJIKKP Tahun 2024 adalah Bagian dan fungsi-fungsi di lingkungan BBSPJIKKP.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-Hasil Pembangunan

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry*

over pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Balai Besar Standardisasi dan pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik memiliki sumber daya baik sumber daya manusia, teknologi, mesin dan peralatan serta pengalaman yang dapat dimanfaatkan oleh Industri dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan daya saing industri yang dibinanya.

Secara umum hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah kegiatan-kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan, pelayanan jasa teknis, reformasi birokrasi dan optimalisasi teknologi. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dirumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan

pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Sebelum tahun 2021, BBSPJIKKP merupakan balai besar yang memiliki tugas pokok fungsi melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kulit, karet dan plastik. Tabel berikut merupakan kegiatan litbang dan perekayasaan yang telah dilaksanakan BBSPJIKKP dari tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2015

No	Kegiatan
1	Pembuatan Kulit Atasan Sepatu Tahan Suhu Dingin
2	Peningkatan Mutu Kulit Reject dengan Aplikasi Berbagai Motif/ Drug untuk Shoe Upper
3	Penggunaan Ekstrak Kolagen dari Limbah Kulit sebagai Flokulan pada Pengolahan Limbah Industri Penyamakan Kulit
4	Aplikasi Teknologi C-RFP untuk Penyamakan Kulit Lemas sebagai upaya Penanggulangan Limbah Krom Industri Penyamakan
5	Pengolahan Lanjut Limbah Cair Industri Lateks Pekat dengan Sistem Adsorpsi
6	Pencetakan Toe Cap Sepatu Pengaman dari Plastik Menggunakan Mesin Cetak Injeksi
7	Optimasi Pembuatan Bioplastik Berbasis Limbah Pertanian
8	Pembuatan Karet Tromol untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua
9	Karakterisasi dan Optimasi Karet V-Belt untuk Motor Matik
10	Kajian Standar di Bidang Kulit
11	Rekayasa Alat Pencacah Kulit untuk Persiapan Contoh Uji Kimiawi

Tabel 2.2. Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2016

No	Kegiatan
1	Penelitian Ekstraksi Keratin Dari Limbah Buang Bulu Pada Proses Penyamakan Kulit Domba
2	Peningkatan Kinerja Flokulan Gelatin Kulit Limbah Melalui Modifikasi Dengan Akrilamida Untuk Pengolahan Limbah Cair
3	Pengembangan Penyamakan Kulit Ramah Lingkungan (Bebas Khrom) Dengan Bahan Penyamak Nabati Untuk Kulit Bagian Atas Sepatu (Shoe Upper)
4	Pembuatan Sepatu Pengaman Dengan Pre Moulded Insole Dan Komposit Toecap
5	Pembuatan Serbuk Lateks Dengan Metode Spray Drying
6	Optimasi Pembuatan Thermoplastik Elastomer Berbasis Karet Alam Untuk Komponen Otomotif
7	Pembuatan Oil Seal Shock Absorber
8	Pengembangan Pembuatan V-Belt Motor Matik
9	Penelitian Pengelolaan Limbah Cair Industri Karet Brown Crepe
10	Pembuatan Komposit Plastik Untuk Toe Cap Sepatu Pengaman
11	Kajian Standar Di Bidang Karet, Kulit Dan Pendukungnya
12	Rekayasa Alat Peregang (Stretcher) Sepatu

Tabel 2.3. Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2017

No	Kegiatan
1	Aplikasi Minyak Kelapa Sawit (<i>Elaeis Guinensis</i> JACQ) Sebagai Agensia Peminyakan Dalam Proses Penyamakan Kulit
2	Pemanfaatan Protein Kolagen dari Limbah kulit (Shaving) untuk Binder Protein pada Finishing Kulit
3	Karet Skim (Rubber Skim) Untuk Karkas Belt Conveyor Tahan Panas
4	Sarung Tangan Karet Anti alergi Berbasis Lateks Karet Alam Terdeproteinasi
5	Pembuatan Packing Oil Seal Mesin Mobil
6	Pembuatan Plastik Biodegradabel untuk Sarung Tangan Sekali Pakai (Tahun I)
7	Pembuatan Acuan Sepatu Multi Toe
8	Rekayasa Mesin Pengikis Mutiara Kulit Ikan Pari untuk Pembuatan Barang Jadi Kulit
9	Kajian Standar di Bidang Kulit, Karet dan Plastik

Tabel 2.4. Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2018

No	Kegiatan
1	Aplikasi hasil hidrolisa limbah shaving penyamakan kulit: skala pilot- plan
2	Aplikasi Minyak Kelapa Sawit (<i>Elaeis Guinensis</i> JACQ) Sebagai Agensia Peminyakan Pada Proses Penyamakan Kulit (Tahap II)
3	Ekstraksi Enzymatis Keratin Dari Limbah Bulu Pada Industri Penyamakan Kulit Domba
4	Pembuatan fatliquoring dari limbah fleshing untuk peminyakan pada proses penyamakan kulit
5	Peningkatan Uptake Krom pada Penyamakan Kulit untuk Mengurangi Emisi Krom dalam Limbah-Tahun I
6	Pembuatan Plastik Biodegradabel untuk Sarung Tangan Sekali Pakai (Tahun II)
7	Karet Alam Peningkat Bentuk (Shape Memory Natural Rubber/SMNR) untuk Komponen Otomotif – Tahun 1
8	Optimasi Pembuatan Karet Wiper Mobil Menggunakan Karet Alam dan Bahan Pengisi PCC Lokal
9	Karet Skim (Rubber Skim) Untuk Karkas Belt Conveyor Tahan Panas (Tahun II)
10	Pembuatan Paking Karet Oil Seal Mesin Mobil
11	Pembuatan Gasket Karet Untuk Komponen Kapal

Tabel 2.5. Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2019

No	Kegiatan
1	Pemanfaatan Sodium Silikat untuk Menurunkan Penggunaan Krom pada Penyamakan Kulit
2	Scale up pembuatan Binder Protein dari Limbah Shaving
3	Pengembangan Membran Periodontal dengan Tingkat Biodegradabilitas dan Kemampuan Pelepasan Obat yang Terkontrol
4	Purifikasi Gelatin dari Limbah Kulit Bebas Krom untuk Kegunaan Farmasi
5	Pembuatan absorben polimer komposit hidrogel berbasis produk samping industri penyamakan kulit
6	Modifikasi Proses Penyamakan Kulit Ikan Pari
7	Aplikasi TPE Berbasis Karet Alam Untuk Karpet Mobil Dengan Proses Thermoforming
8	Karet Pintar Pengukur Bobot Kendaraan dengan Teknologi Weigh-in-Motion (WIM)
9	Karet Skim (Rubber Skim) Untuk Karkas Belt Conveyor Tahan Panas (Tahun III)
10	Karet alam penguat bentuk (Shape Memory Natural Rubber/SMNR) untuk komponen otomotif (Tahun 2)

Tabel 2.6. Kegiatan Litbang dan Perekayasaan Tahun 2020

No	Kegiatan
1	Pengembangan Membran Periodontal dengan Tingkat Biodegradabilitas dan Kemampuan Pelepasan Obat yang Terkontrol

Hasil realisasi pada tahun 2021 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BBSPJIKKP terkait optimalisasi teknologi, antara lain:

- Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk sebanyak 1 tenan
- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri sebanyak 1 kegiatan kolaborasi
- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri sebanyak 2 perusahaan;

Berikut merupakan hasil realisasi pada tahun 2022 terkait optimalisasi teknologi, antara lain:

- Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk dengan realisasi 1 tenan
- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri dengan realisasi 1 kegiatan kolaborasi
- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri dengan realisasi sebanyak 3 perusahaan
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dengan realisasi sebanyak 61,12%

Dalam pelaksanaan layanan jasa, efektivitas dalam aktivitas pelayanan jasa dijadikan indikator kinerja utama. Selama rentang waktu 2017-2022 telah tercatat sebanyak 2.863 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan di BBSPJIKKP.

Tabel 2.7. Jumlah Pelanggan 2017 – 2023*

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Riset	3	2	3	1	0	0	0
2	Pelatihan	21	35	30	28	17	15	21
3	Pengujian	242	384	376	303	199	204	126
4	Kalibrasi	40	46	44	49	48	52	42
5	Konsultasi	2	2	0	2	2	5	1
6	Sertifikasi	115	125	127	89	113	79	47

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
7	RBPI	0	0	0	0	0	0	0
8	Jasa lainnya	38	93	35	143	107	119	74
	Total	461	687	615	615	486	474	311

Pada rentang tahun 2017-2023 tersebut, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 1.504 atau 52,53 % dari total pelanggan dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan PNBPN yang diterima selama kurun waktu 2017 – 2021 BBSPJIKKP menghasilkan PNBPN sebesar Rp. 25.858.871.258,-, layanan sertifikasi masih sebagai penghasil PNBPN terbesar yaitu sebesar Rp. 13.997.046.000,- atau 54,12% dari total pendapatan PNBPN yang diterima selama lima tahun terakhir, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.8. Realisasi PNBPN Tahun 2018-2022

Layanan	2018	2019	2020	2021	2022
Penelitian Dan Pengembangan	109.580.000	0	14.968.807	0	0
Pelatihan	446.461.000	779.840.000	293.365.000	236.895.000	464.234.000
Pengujian	897.811.812	931.158.050	412.414.755	410.822.744	750.832.150
Kalibrasi	124.200.065	112.036.500	110.215.000	97.611.000	168.513.200
Sertifikasi	3.261.395.000	3.203.850.000	1.976.682.000	2.776.422.000	2.624.100.000
Bimtek/ Konsultansi	21.930.000	-	-	24.900.000	-
JPT Lainnya	216.864.530	161.646.600	31.344.725	38.192.359	228.539.807
Jumlah	5.078.242.407	5.188.531.150	2.838.990.287	3.584.843.103	4.207.051.331

B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga

periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *net* ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

- a. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d. Perbaiki desain zona industri nasional; dan
- e. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan Teknologi

- a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b. Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d. Pengembangan standardisasi industri dan industri hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) BBSPJIKKP yang disusun ini menyajikan indikator-indikator kinerja sasaran maupun kegiatan. Pada saat penyusunan, indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang dianggap terbaik. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman serta referensi-referensi tambahan, indikator-indikator yang tidak sesuai nantinya akan mengalami perubahan.

Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renkin diambil dari dokumen Renstra. Pada saat penyusunan Renstra, sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran yang dianggap terbaik. Namun demikian, seperti juga pada indikator kinerja, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengakibatkan sasaran-sasaran yang ditetapkan menjadi kurang tepat dan perlu disempurnakan. Sasaran-sasaran tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam kaitannya dengan tujuan masing-masing. Namun, sebagian sasaran berorientasi pada output dan lebih bersifat kegiatan.

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 beserta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub
Komponen Pendukung

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi - Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis - Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen/RBPI
	2. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam penerapan industry 4.0 dan/atau standardisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri - Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen/RBPI
	2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi - Jasa Pelayanan sertifikasi profesi - Jasa pelayanan inspeksi teknis - Jasa pelayanan verifikasi gas rumah kaca - Jasa pelayanan uji profisiensi - Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal - Miniplant karet
	3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam Pameran/Promosi
	4. Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji - Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi - Pemeliharaan akreditasi

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
		lembaga inspeksi teknis - Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profesiensi - Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal
	5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	- Pengadaan kendaraan bermotor operasional - Pengadaan pralatan pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Nilai minimal indeks manajemen resiko	Pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas/SPIP
	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	- Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan
KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Pembayaran gaji dan tunjangan
SK7. Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	- Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pengelolaan data dan informasi - Pengelolaan Kearsipan
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	2. Nilai minimal laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Pencapaian sasaran dari setiap program sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama pelaksanaan

program berjalan. Untuk mencapai sasaran secara optimal diperlukan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari suatu program yang baik.

BBSPJIKKP mempunyai rencana sasaran sebanyak 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023, agar keempat sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal maka diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang baik. Untuk setiap sasaran diidentifikasi resiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut, dan dilakukan antisipasi untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Berikut ini identifikasi resiko dan antisipasi untuk mengatasinya :

Tabel 3.2. Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
1.	SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan nonmigas	1. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	- Hasil litbang yang tidak dapat diaplikasikan oleh industri - Pengembangan teknologi yang tidak efisien	- Melakukan survey litbang yang dibutuhkan oleh industri - Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
		2. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	- Pengembangan teknologi yang tidak efisien	- Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
2.	SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	- Pengembangan teknologi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman	- Melakukan pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat industri pada saat ini

3,	SK3. Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	- Pengembangan teknologi yang tidak efisien	- Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
		2. Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	- Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima - Berusaha menambah sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
		3. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri		
		4. Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri		
		5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	-Penggunaan produk dalam negeri rendah	- Meminimalisir penggunaan produk luar negeri
4.	SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Nilai minimal indeks manajemen resiko	- Temuan internal belum ditindaklanjuti	- Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan
		2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		

5.	SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
6.	KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya motivasi SDM untuk meningkatkan kompetensinya - Rendahnya nilai disiplin pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Memotivasi SDM dan mengadakan pelatihan teknis internal - Memberi reward untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin tinggi dan memberi punishment untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin rendah

7.	SK7. Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
8.	SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja 2. Nilai minimal laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang lengkapnya dokumen pendukung yang memenuhi standar dalam penilaian SAKIP dan laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi dokumen pendukung untuk memenuhi standar penilaian SAKIP dan laporan keuangan

Dalam pencapaian sasaran program, BBSPJIKKP melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021 - 2024.

Kegiatan-kegiatan tersebut rencananya dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 dengan rencana anggaran sebesar Rp.25.385.899.000.

Kegiatan-kegiatan BBSPJIKKP dikelompokkan dalam 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (EC) dan Program Dukungan Manajemen (WA) dengan jumlah anggaran disesuaikan jika ada perubahan Pagu yang diberikan oleh BSKJI.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai komponen pada output dan sub output kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Rencana Anggaran BBSPJIKKP TA 2024

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		4.178.771.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		
AEC	Kerja sama		25.431.000
003	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		25.431.000
	051	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	25.431.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		281.934.000
005	Promosi/publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/ Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		281.934.000
	051	Partisipasi dalam pameran/promosi	116.941.000
	052	Diseminasi	53.177.000
	053	Survei Kepuasan Masyarakat Dan Temu Pelanggan	111.816.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri		2.994.312.000
007	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Kulit, Karet dan Plastik		622.857.000
	051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	507.217.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji	55.640.000
015	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Kulit, Karet dan Plastik		260.460.000
	051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	183.160.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	77.300.000
027	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Kulit, Karet dan Plastik		1.295.113.000
	051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	1.094.873.000
	052	Jasa Pelayanan Sertifikasi Profesi	43.470.000
	053	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	156.500.000
039	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		118.042.000
	051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	118.042.000
044	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri Kulit, Karet dan Plastik		85.860.000
	051	Jasa Pelayanan Konsultasi Teknis/Manajemen	85.860.000

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
085	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		195.980.000
	051	Jasa pelayanan inspeksi teknis	30.880.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknis	52.380.000
	053	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca	40.900.000
	054	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca	71.820.000
088	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik		80.490.000
	051	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	49.920.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Uji Profisiensi	30.570.000
089	Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal Industri Kulit, Karet dan Plastik		283.350.000
	051	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal	244.750.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	39.100.000
093	Jasa Pelayanan Proses dan Mesin Industri Kulit, Karet dan Plastik		51.660.000
	051	Miniplant Karet	22.908.000
	052	Miniplant Kulit	28.752.000
BDI	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri		67.388.000
005	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik		67.388.000
	051	Pemanfaatan Paket Teknologi/supervisi/konsultasi	67.388.000
CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan		503.496.000
006	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan BBSPJIKKP		503.496.000
	051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	503.496.000
PDA	Standarisasi Produk		306.210.000
001	Bahan Acuan Standar		306.210.000
	051	Pengembangan bahan acuan standar (standard reference material) berbasis karet dan Lembaga Produsen Bahan Acuan	306.210.000
WA	Program Dukungan Manajemen		21.207.128.000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri		21.207.128.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		20.064.733.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat		143.229.000
	051	Pengelolaan Data dan Informasi	143.229.000
994	Layanan Perkantoran		19.921.504.000
	001	Gaji dan Tunjangan	14.666.372.000
	002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	5.255.132.000

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		564.845.000
	053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	564.845.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		500.000.000
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan		500.000.000
	051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	500.000.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		77.550.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		17.160.000
	051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	17.160.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		13.420.000
	052	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	13.420.000
955	Layanan Manajemen Keuangan		25.000.000
	051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	25.000.000
961	Layanan Reformasi Kinerja		11.460.000
	051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/ SPIP	11.460.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		10.510.000
	051	Penyelenggaraan Kearsipan	10.510.000
TOTAL			25.385.899.000

B. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkanlah ukuran untuk menentukan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran tersebut melalui penetapan indikator kinerja. Berikut ini indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri (IKU)	2 kegiatan
	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (IKU)	7 Persen
Penguatan Implementasi	Peningkatan peran balai	5 Perusahaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Making Indonesia 4.0	dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industry (IKU)	
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (IKU)	7 Persen
	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (IKU)	50 Persen
	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri (IKU)	88 SPK/Order
	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri di dalam negeri (IKU)	2 Ruang Lingkup
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (IKU)	80 Persen
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Indeks 4
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh	100 Persen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
	satker	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,85
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 81
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Nilai 3,7
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 82,9
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 92

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2024 disusun mengacu pada sasaran dan program yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024. Penyusunan Renkin ini adalah merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima dari program lima tahun yang akan ditetapkan dalam Renstra Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024. Rencana rincian kegiatan dan keluaran yang ingin dilaksanakan diarahkan guna meningkatkan daya saing industri kulit, karet dan plastik.

Dengan demikian Renkin ini merupakan bentuk komitmen penuh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik dalam rencana mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2024 ini.

LAMPIRAN

FORMULIR RENCANA KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Kulit, Karet dan Plastik

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	2	Kegiatan
		2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	7	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	5	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	7	Persen
		2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	50	Persen
		3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	88	Persen
		4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	2	Ruang Lingkup
		5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	80	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	4	Nilai
		2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,85	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	81	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,7	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,9	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai

Yogyakarta, 23 Januari 2023

Kepala,



Agus Kuntoro

MATRIKS KETERKAITAN AKTIVITAS UTAMA DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Aktivitas Utama	
			2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik							23.42	22.67	23.10	23.62	25.38		
Program Nilai Tambah dan Daya Saing													
Pengembangan dan Penyelenggaraan Industri													
SK 1. Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	1	1	2	2						- Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet - Kegiatan PINOTI
	2	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7						- Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet - Kegiatan PINOTI
SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Perusahaan	2	3	4	5						Jasa pelayanan audit teknologi
SK 3. Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri													
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	N/A	5	6	7						Kegiatan DAPATI
	2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Persen	5	5	40	50						Layanan Pengujian, Kalibrasi, Uji Profisiensi, Sertifikasi, Sertifikasi Profesi, Pemeriksa dan Pengujian Halal, Penyedia Material Acuan Standar, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Inspeksi Teknis
	3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh industri	SPK/Order	N/A	N/A	85	88						- Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik - Partisipasi dalam pameran/ promosi - Diseminasi
	4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A	1	1	2						Layanan Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca,
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80						- Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Aktivitas Utama	
			2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK 4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	100	100	100	100						Penerapan SPIP
	2	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4						- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SK 5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan													
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85						Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan
SK 6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional													
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81						- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Pembayaran gaji dan tunjangan
SK 7. Penguatan Layanan Publik													
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	3.6	3.7						- Pembuatan Sistem Informasi Training Center dan Sertifikasi Profesi BBSPJIKKP - Penyelenggaraan Kearsipan - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
SK 8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi													
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	82,6	82,9						- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91						Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBSPJIKKP TAHUN 2021-2024

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik				22.675,61		23.081,42		23.628,75		28.179,24
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1		1					
A	Pemanfaatan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi			73,61		90,00				
SK.1.2	Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	1		1		2		2	
A	Partisipasi dalam Pameran/Promosi			75,53		58,09				
B	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi						33,15			70,00
C	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis			29,90		29,90		20,00		30,00
D	Pengusulan hasil litbangyasa untuk dipatenkan			40,02						
E	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen/ RBPI*									
F	Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang			13,32						
G	Penerapan hasil litbangyasa			92,58						
H	Kajian Awal Kelayakan Teknologi Pengembangan Produk Kulit, Karet, dan Plastik			76,33						
I	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			95,27						
SK.1.3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen					6		7	
A	Diseminasi							48,84		80,00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Perusahaan	2		3		4		5	
A	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			121,19		110,00				
B	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri							80,00		100,00
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri							10,00		30,00
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		5		6		7	
A	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			50,30		50,30		60,00		70,00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5		5		40		50	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			198,11		723,12		588,34		700,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			516,74		400,00		344,96		400,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			216,34		183,54		82,17		85,00
D	Kaji ulang dokumen SNI			73,39		12,34				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Jasa pelayanan sertifikasi profesi							31,50		33,00
F	Jasa pelayanan inspeksi teknis							70,00		75,00
G	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca							52,58		60,00
H	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi							32,40		35,00
I	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal							28,50		30,00
J	Miniplant karet							67,32		70,00
K	Miniplant kulit									70,00
L	Jasa pelayanan audit teknologi									30,00
M	Jasa pelayanan pendampingan dan assemen INDI 4.0									30,00
N	Jasa pelayanan Verifikasi TKDN									30,00
SK.3.3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order						85		88
A	Partisipasi dalam Pameran/Promosi							56,49		100,00
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A		1			1		2
A	Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji			84,58		80,40		55,64		56,00
B	Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi			23,65		91,33		48,68		50,00
C	Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi			205,71		197,76		181,71		175,00
D	Akreditasi/pemeliharaan lembaga inspeksi					49,40		46,40		47,00
E	Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca							29,84		30,00
F	Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi							30,57		32,00
G	Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal							39,10		40,00
H	Penyusunan roadmap pengembangan LPK									10,00
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75			78		80
A	Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi			104,93		200,64		146,70		100,00
B	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			130,05		40,00		76,45		100,00
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.351,41		4.721,59		4.957,67		5.300,00
D	Pengadaan kendaraan bermotor operasional							388,00		
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3		3			4		4
A	Penerapan SPIP			18,60		12,65		15,00		20,00
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92			100		100
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			21,98		15,00		15,00		20,00
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,70		3,75			3,80		3,85
A	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan			548,47		365,00				
B	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan			60,66		60,66		41,84		100,00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76			78		81

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			358,80		283,77		320,00		500,00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan						14.823,26			15.231,24
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	90		90					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			14.326,41		14.880,70				
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3,01		3,51		3,60		3,70	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			109,29		10,00				
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			440,27		235,50		635,63		4.050,00
C	Pengelolaan data dan informasi			141,76		120,69		121,00		130,00
D	Pengelolaan Kearsipan			13,34		13,34		15,00		15,00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	82,0		82,3		82,6		82,9	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			37,38		20,00		15,00		20,00
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		92	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			25,70		25,70		20,00		25,00